

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI SMA NEGERI 1 JETIS

IMPLEMENTATION OF CULTURE-BASED EDUCATION POLICIES AT JETIS 1 STATE HIGH SCHOOL

Oleh: Sania Kusuma, Universitas Negeri Yogyakarta
saniakusuma.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi. Subjek penelitian kepala sekolah, tim budaya, dan siswa. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian: Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya tersebut memiliki Standar Perda DIY No.5 Tahun 2011 dan UU No.13 Tahun 2012 dengan tujuan melestarikan nilai-nilai budaya sesuai visi misi sekolah. Sumber daya meliputi kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, masyarakat serta sarana prasarana memadai. Karakteristik pelaksana berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Hubungan antar organisasi terjalin dengan koordinasi dan kerjasama. Disposisi implementator tercermin dari karakteristik pelaksana. Kondisi lingkungan saling mendukung. Faktor pendukungnya SDM berkompeten, Sarana prasarana memadai, Banyaknya ekstrakurikuler. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber dana, rendahnya kesadaran dan pembiasaan siswa, covid-19.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Berbasis Budaya, SMA Negeri 1 Jetis

Abstract

The purpose of this study is to describe the implementation and factors that support and inhibit the implementation of culture-based education policy at Senior High School 1 Jetis. This study uses a phenomenological qualitative research method. The research subjects were the principal, the cultural team, and students. Research data were collected through observation, interviews, and documentation. Data collection techniques through data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data used triangulation of sources and techniques. Results: Implementation of culture-based education has a standard DIY regulation No. 5 of 2011 and Law no. 13 of 2012 with the aim of preserving cultural values according to the school's vision and mission. The subjects of principals, teachers, students, employees, and the community as well as adequate infrastructure. The characteristics of the performer are devoted to the responsibility as a cultural team. Inter-institutional relations through coordination and cooperation. The nature of the performer is reflected in the characteristics of the performer. Good environmental conditions the supporting elements are competent human resources, Adequate infrastructure, Number of extracurricular cultural activities. The impediments are Insufficient sources of funds, students' awareness and habits are low, and covid-19 pandemic.

Key words: Policy Implementation, Culture-Based Education, Jetis 1 State High School

PENDAHULUAN

Pendidikan ditujukan untuk mewariskan nilai-nilai luhur budaya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Isi dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan pada dasarnya tidak hanya bertujuan mengembangkan kecerdasan intelektual saja tetapi juga menyalurkan kebudayaan dari pendidik kepada peserta didik baik itu pengetahuan, nilai, dan norma untuk membentuk manusia yang berbudaya. Tugas dari pendidikan adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Haar Tilaar (Alexon, 2010: 2) menyebutkan bahwa manusia Indonesia yang cerdas ialah manusia yang memiliki nilai-nilai pancasila dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal penting yang saling berkaitan. Hal ini sejalan dengan pendapat Tylor, Koentjaraningrat, dan Ki Hadjar

Dewantara (Tilaar, 2000: 49) bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Sehingga tanpa adanya proses pendidikan, kelestarian dan perkembangan kebudayaan tidak mungkin berlangsung. Oleh karenanya pendidikan menjadi sarana transformasi kebudayaan (Yuristia, 2018). Pendidikan berupaya memberikan pengetahuan dasar kebudayaan sebagai bekal hidup manusia. Karena keseluruhan dalam hidup manusia ialah sikap dan perilaku. Sehingga pengembangan dan pelestarian kebudayaan dalam suatu proses pendidikan perlu diinternalisasikan.

Namun pada nyatanya bangsa Indonesia belum menyadari pentingnya pendidikan sebagai bentuk pelestarian kebudayaan. Hal ini disebabkan karena dampak perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu cepat. Kecanggihan teknologi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi budaya asing masuk ke Indonesia. Kehadiran teknologi tersebut mengakibatkan masyarakat meninggalkan nilai-nilai luhur budaya (Supriyatno, 2019). Dampak yang timbul seperti maraknya fanatisme generasi muda terhadap budaya Korea yang dikenal dengan k-pop. Berdasarkan data *statista research departement* yang menyebutkan jumlah tontonan k-pop di *youtube* pada tahun 2019, negara Indonesia berada di posisi kedua setelah Korea Selatan. Selain itu berdasarkan

rilisan UNESCO tahun 2019 menyatakan bahwa kurang lebih 100 bahasa daerah di Indonesia rawan punah (Kompas.com, 2021). Dampak lain yaitu lunturnya moralitas generasi muda ditandai dengan adanya tawuran dan pergaulan bebas.

Melihat permasalahan tersebut, kurangnya pendidikan dan pembelajaran budaya merupakan salah satu sebab dari memudarnya nilai-nilai luhur budaya daerah (Nahak, 2019: 171). Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kebersamaan, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain (Suyitno, 2012: 2). Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mengatasinya.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar sekaligus kota berbudaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dikeluarkanlah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka

terhadap lingkungan, dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia”.

Berdasarkan penjelasan tersebut pendidikan berbasis budaya diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan dengan menjunjung nilai-nilai luhur budaya guna mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tetap menghormati budaya nasional. Dibuatnya Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 ini juga sejalan dengan visi pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mewujudkan daerah sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2025.

Menindaklanjuti Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 SMA Negeri 1 Jetis berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan berbasis budaya sejak tahun 2017. Hal ini sejalan dengan visi misi SMA Negeri 1 Jetis yaitu “Bertaqwa, berprestasi, berbudaya, sehat, dan arif terhadap lingkungan”. Misi berbudaya salah satunya yaitu menerapkan nilai-nilai budaya daerah dan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengapresiasi dan menjunjung tinggi budaya daerah dan nasional.

Keunikan yang dimiliki SMA Negeri 1 jetis dalam pelaksanaan

pendidikan berbasis budaya salah satunya yaitu sekolah memiliki corak batik sendiri yang digunakan untuk seragam sekolah bagi peserta didik. Pembuatan batik tersebut dilakukan langsung oleh peserta didik. Keunikan lain yang dimiliki sekolah yaitu adanya program Jumat Jawa Mlipis (JJM) yang mewajibkan seluruh warga sekolah membiasakan berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa halus setiap hari Jumat. Seluruh warga sekolah berkomitmen untuk membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari serta selalu membudayakan senyum, sapa, dan salam.

Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis dalam mencapai keberhasilan tidak terlepas dari peran tim budaya sekolah yang memiliki kompetensi bidang budaya. Sehingga dalam melaksanakan tugas dapat terarah. Tim budaya tersebut berasal dari guru yang mengampu mata pelajaran seni budaya, seni tari, seni rupa, dan bahasa Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, selama proses pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis masih dijumpai berbagai hambatan. Pembiasaan berbahasa Jawa halus bagi peserta didik masih belum optimal karena sulit dimengerti sehingga mereka lebih memilih menggunakan bahasa *ngoko* dan bahasa Indonesia. Selain itu dari segi teknis sekolah belum memiliki

buku pedoman khusus terkait pelaksanaan pendidikan berbasis budaya. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu adanya penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi dan faktor pendukung serta penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 1 Jetis. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengembangan keilmuan dan wawasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang kebijakan dalam merumuskan dan pengambilan keputusan. Sementara itu secara praktis kegunaan bagi sekolah agar dapat digunakan sebagai refleksi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 1 Jetis sehingga dapat mengembangkan dan menciptakan kegiatan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan

pendekatan fenomenologi karena didukung oleh fakta bahwa: (1) data penelitian ini merupakan data yang nampak di permukaan termasuk kebiasaan sehari-hari warga sekolah saat berinteraksi dengan warga sekolah lainnya mengenai pendidikan berbasis budaya. (2) fokus penelitian melihat bagaimana implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Jetis bantul berlokasi di Jl. Pendidikan, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - April 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti menentukan orang-orang yang dianggap tahu terhadap situasi sosial terhadap kajian yang akan diteliti sebagai sumber data. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru yang bertugas dalam tim budaya. Objek dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model interaktif dari Miles huberman dan Saldana (2014:12) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data merupakan bagian dari analisis dengan proses penyelidikan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang mendekati keseluruhan dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan berbagai materi empiris lainnya yang diperoleh pada saat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengkategorikan data-data penting yang relevan dengan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan oleh peneliti dalam bentuk uraian singkat. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah tahap kondensasi dan penyajian data selesai. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

Keabsahan Data

Uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 1 Jetis merupakan hasil penelitian diperoleh melalui pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor pendukung serta penghambat dari pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn yang memuat 6 aspek.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 1 Jetis

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Van Meter Van Horn dalam Subarsono (2005:99) menjelaskan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

Standar pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis mengacu pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis

Budaya dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan yang ingin dicapai SMA Negeri 1 Jetis sesuai dengan visi misi sekolah yaitu Bertaqwa, berprestasi, berbudaya, sehat, dan arif terhadap lingkungan serta memiliki misi menerapkan nilai-nilai budaya daerah dan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diharapkan agar kelestarian dan eksistensi budaya bangsa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta tetap terjaga.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang telah ada. Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) menyebutkan sumber daya yang paling esensial dalam keberhasilan proses implementasi yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya sarana dan prasarana. Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn dalam Hasbullah (2016: 97) menyebutkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

Sumber daya manusia yang terlibat adalah seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.

Sumber daya dana penunjang berasal dari dana BOS, APBD, dan komite sekolah serta bantuan insidental dari Dinas Kebudayaan Bantul.

Sumber daya sarana dan prasarana penunjang proses implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya meliputi ruang budaya, ruang teatral, ruang batik, amfiteater, gamelan, angklung, alat band, alat hadroh, pakaian adat lengkap, dan slogan-slogan bertuliskan bahasa jawa.

Sumber daya waktu yang dialokasikan SMA Negeri 1 Jetis dalam proses implementasi pendidikan berbasis budaya meliputi kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan berbagai program serta kegiatan pembiasaan. Intrakurikuler melalui mata pelajaran seni budaya dan PKWU membuat batik. Ekstrakurikuler melalui seni tari, karawitan, teater, dan angklung. Berbagai program dan kegiatan sekolah meliputi jumat jawa mlipis, *flashmop* tarian daerah, workshop tata laku budaya, workshop tata wicara, workshop tata busana jawa, workshop cerkak, dan geguritan. Kegiatan pembiasaan meliputi, unggah-ungguh, 5S, dan pembiasaan *matutur*.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) menyebutkan karakteristik agen pelaksana meliputi

struktur birokrasi dan pembagian tugas yang akan mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi di SMA Negeri 1 Jetis menyesuaikan dengan stuktur sekolah yang kemudian didalamnya dibentuk beberapa tim unggulan yang dimiliki sekolah, salah satunya TIM sekolah berbasis budaya yang telah didasarkan pada surat keputusan kepala sekolah Nomor 814/4892 Tahun 2022 tentang tugas tambahan sebagai tim sekolah berbasis budaya.

Pembagian tugas yang dilakukan SMA Negeri 1 Jetis sesuai dengan TIM sekolah berbasis budaya yang beranggotakan 8 orang. Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan berbasis budaya dipegang kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang humas menjadi konsultan untuk menjembatani komunikasi antara koordinator tim budaya dengan kepala sekolah. Koordinator TIM budaya bertugas memimpin dan memberikan arahan. Anggota tim budaya bertugas sesuai dengan seksi-seksi yang telah ditentukan. Selain itu seluruh guru turut membantu saat kegiatan belajar mengajar di kelas.

4. Hubungan Antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) menyebutkan proses implementasi perlu adanya

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sehingga dapat terjalin kerjasama dan koorinasi yang baik antar instansi demi keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan.

Koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana dalam implementasi pendidikan berbasis budaya melalui rapat penyusunan program, pelaksanaan program dan evaluasi. Rapat penyusunan program dilakukan 3-4 kali maupun satu bulan sekali sesuai kebutuhan secara tatap muka maupun daring. Koordinasi dilakukan secara tatap muka maupun daring menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* atau *chat grup whatsapp*.

Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis juga melakukan kerjasama degan pihak luar. Kerjasama tersebut dilakukan dengan Kraton Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dan guru yang tergabung dalam MGMP.

5. Disposisi Implementator

Edward III dalam Hasbullah (2016: 99) menjelaskan bahwa disposisi merupakan suatu sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan pendidikan. Apabila pelaksana implementator konsisten dalam menjalankannya maka kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil. Pandangan Van Meter dan Van Horn

dalam Subarsono (2005:99) menyebutkan bahwa variabel disposisi mencakup tiga hal meliputi respon implementator terhadap kebijakan, pemahaman, dan intensitas disposisi implementator.

SMA Negeri 1 Jetis telah melaksanakan kebijakan pendidikan berbasis budaya. Hal ini berkaitan dengan komitmen para pelaksana untuk bertanggung jawab melaksanakan pendidikan berbasis budaya untuk terus merancang inovasi kegiatan pengembangan berbasis budaya. Selain itu berhubungan dengan komitmen juga didukung dengan adanya budaya pemerintah satria yang harus dimiliki tanaga pendidik dan kependidikan sehingga para pelaksana memiliki tugas untuk menyampaikan dan mencontohkan keteladanan dalam hal nilai-nilai budaya. Dengan demikian kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

Selain komitmen, kemampuan pelaksana juga menjadi variabel yang penting dalam disposisi implementator. Para pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis telah disesuaikan dengan bidangnya yang terdiri dari guru seni budaya, guru bahasa jawa maupun guru ekstrakurikuler tari.

Pengawasan penting dilakukan agar pelaksanaan pendidikan berbasis budaya sesuai antara keadaan di lapangan dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim budaya, dan seluruh guru dengan cara memantau dan mengontrol kegiatan berbasis budaya. Hasil dari pengawasan kegiatan dilaporkan kepada tim budaya. Selain itu juga dilakukan evaluasi setiap akhir kegiatan dan akhir semester beserta laporan pertanggung jawaban hasil kegiatan budaya.

6. Kondisi Lingkungan

Weimer dan Vining dalam Suharno (2003: 178) menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan lingkungan yang kondusif. Semakin kondusif lingkungannya, maka semakin lancar pula kebijakan yang diimplementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian SMA Negeri 1 Jetis dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya para pelaksana mampu menciptakan lingkungan yang kondusif. Artinya kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa mendukung adanya kebijakan tersebut. Hal ini tercermin adanya konsistensi dan tanggung jawab para

pelaksana untuk rutin melaksanakan berbagai kegiatan berbasis budaya dan juga melakukan evaluasi bersama guna memperbaiki kekurangan serta menciptakan inovasi pengembangan budaya lainnya. Selain itu juga dukungan dari siswa yang antusias dan berpartisipasi disetiap program kegiatan budaya. Sementara itu lingkungan sekolah yang luas dan rindang menambah kenyamanan dalam melaksanakan berbagai program kegiatan budaya.

Kondisi luar lingkungan SMA Negeri 1 Jetis memberikan dukungan positif dalam melaksanakan kebijakan pendidikan berbasis budaya. Dukungan tersebut berasal dari komite sekolah, orang tua maupun masyarakat sekitar.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 1 Jetis

1. Faktor Pendukung

Faktor pertama berasal dari sumber daya manusia di SMA Negeri 1 Jetis. Arif Rohman (2012: 115) menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu dari personil pelaksana. Hal ini didukung oleh kepala sekolah yang memiliki *background* abdi dalem kraton yang sangat memperhatikan nilai budaya dalam lingkungan sekolah.

Faktor kedua didukung adanya program kegiatan ekstrakurikuler pengembangan bakat siswa. Syukur dalam Hasbullah (2016: 104) menyebutkan bahwa salah satu unsur penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Adanya program ekstrakurikuler seperti seni tari, karawitan, pencak silat, teater, dan seni musik di sekolah menjadikan siswa berpartisipasi mengembangkan potensinya.

Faktor ketiga didukung oleh adanya sarana prasarana yang cukup memadai. Ali Imron dalam Hasbullah (2016: 105) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu faktor sumber potensial yang tersedia. Di SMA Negeri 1 Jetis sarana prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan berbasis budaya yang telah tersedia antara lain ruang budaya, amfiteater, ruang teatrikal, ruang batik, gamelan, angklung, alat hadroh, pakaian adat lengkap, dan juga berbagai ornamen budaya yang dipajang didinding sekolah.

2. Faktor Penghambat

Faktor pertama yang menjadi yaitu sumber dana yang masih terbatas. Karena untuk melaksanakan suatu

kegiatan budaya membutuhkan biaya yang besar.

Faktor kedua yaitu berasal dari sasaran kebijakan. Ali Imron dalam Hasbullah (2016: 106) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berasal dari sasaran kebijakan. Kesadaran dan pembiasaan siswa mengenai pelestarian budaya masih rendah sehingga dalam melaksanakan kegiatan menjadi kurang maksimal. Masih dijumpai siswa yang kurang berminat mengikuti kegiatan budaya dan ada juga yang lupa ketika hari jumat harus berkomunikasi menggunakan bahasa jawa halus.

Faktor ketiga yaitu adanya pandemi covid yang menghambat seluruh kegiatan sekolah termasuk berbagai program pendidikan berbasis budaya yang telah terencana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 1 Jetis telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang memuat enam variabel terdiri dari: 1) Standar dan tujuan kebijakan mengacu pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tertulis dalam visi misi sekolah dengan harapan dapat melestarikan budaya DIY. 2) Sumber daya. Sumber daya manusia terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan. Sumber daya dana berasal dari dana BOS, APBD, komite sekolah, dan dana insidental Dinas Kebudayaan Bantul. Sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu amfiteater, ruang budaya, ruang teatral, ruang batik, gamelan, angklung, alat band, alat hadroh, pakaian adat lengkap, dan slogan-slogan bertuliskan bahasa Jawa. Sumber daya waktu dialokasikan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, berbagai program budaya dan kegiatan pembiasaan budaya. 3) Karakteristik agen pelaksana meliputi struktur organisasi dan pembagian tugas. Struktur organisasi menyesuaikan struktur organisasi sekolah yang didalamnya dibentuk tim budaya. Sementara itu pembagian tugas telah diatur dan dibentuk seksi-seksi dalam tim budaya. 4) Hubungan antar organisasi terjalin dengan baik dengan melakukan koordinasi antar pelaksana dan kerjasama dengan pihak luar sekolah. 5) Disposisi Implementator. Para implementator berkomitmen melaksanakan pendidikan berbasis budaya. Hal tersebut didukung adanya budaya satria. Sehingga pelaksana bertanggung jawab dan selalu melakukan

pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis budaya. 6) Kondisi lingkungan. SMA Negeri 1 Jetis mendapat dukungan positif dari dalam maupun luar lingkungan sekolah. Dukungan dari dalam berasal dari warga sekolah. Sementara itu dukungan dari luar sekolah berasal dari masyarakat sekitar.

Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya yaitu:

Faktor pendukung terdiri dari SDM yang terlibat terutama kepala sekolah yang memiliki *background* budayawan. Terdapat banyak pilihan ekstrakurikuler pengembangan siswa. Sarana prasarana yang tersedia cukup memadai.

Faktor penghambat meliputi sumber dana yang kurang mencukupi untuk melaksanakan berbagai program kegiatan, kesadaran dan pembiasaan siswa mengenai pelestarian budaya masih rendah. Adanya pandemi covid-19 menghambat pelaksanaan pendidikan berbasis budaya.

Saran

1. Sekolah

Sekolah perlu menjalin kerjasama dengan Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dalam proses pelaksanaan pendidikan berbasis budaya mendapatkan perhatian khusus serta mendapatkan dukungan secara finansial maupun moril.

2. Kepala Sekolah
Kepala sekolah sebaiknya lebih menekankan kembali mengenai pendidikan berbasis budaya kepada seluruh warga sekolah. Selain itu juga perlu memperhatikan dan memperbaharui sarana prasarana pendukung pendidikan berbasis budaya serta program kegiatan sekolah berbasis budaya.
3. Guru
Guru sebaiknya mampu menciptakan inovasi pembelajaran untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya pada mata pelajaran lain. Sehingga tidak hanya mata pelajaran seni saja yang mengandung nilai budaya. Selain itu guru juga perlu mengajak dan memotivasi siswa agar lebih berpartisipasi di seluruh kegiatan berbasis budaya.
4. Siswa
Siswa sebaiknya lebih meningkatkan rasa empati dan lebih aktif untuk berpartisipasi mengikuti berbagai kegiatan berbasis budaya.

Rekomendasi Kebijakan

1. Sekolah perlu mengeluarkan regulasi kebijakan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut agar mendapatkan pengakuan dan perhatian dari Dinas Pendidikan DIY.

2. Perlu adanya pembaruan tugas pokok secara tertulis dan terperinci bagi setiap anggota tim budaya agar lebih jelas akan tanggung jawabnya masing-masing.
3. Perlu adanya inovasi kegiatan berbasis budaya untuk menarik perhatian siswa lebih berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexon. (2010). *Pembelajaran Terpadu Berbasis Budaya*. Bengkulu: Perpustakaan Nasional RI.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Hardani et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasbullah. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imron, A. (2008). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutapea, E. (2021). *Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah, Simak Perinciannya*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/22/061200071/bahasa-daerahdi-indonesia-terancam-punah-simakperinciannya?page=all>
Diakses pada Senin, 10 Januari 2022
- Miles, M. B., Huberman, A. M., &

- Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>. Diakses pada 20 Juli 2022.
- Nahak, Hildgardis M. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5(1):65–76. doi: 10.33369/jsn.5.1.65-76.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya*.
- Pesiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2003). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kebijakan Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Supriyatno, Helmi. (2019). *Lunturnya Budaya Tradisional di Era Digital*. <https://www.harianbhirawa.co.id/lunturnya-budaya-tradisional-di-era-digital/> Diakses pada Selasa, 11 Januari 2022
- Suyitno, Imam. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter* 2:1–13.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yuristia, Adelina. (2018). Pendidikan
- Sebagai Transformasi Kebudayaan. *Journal Ilmu Sosial dan Budaya* 2(1):1–13.